



**BPR ARTHA TANAH MAS**



[www.tanahmasbpr.co.id](http://www.tanahmasbpr.co.id)



[bpr.atm@gmail.com](mailto:bpr.atm@gmail.com)



Bpr Artha Tanah Mas

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

**2025**

---

**PT BPR ARTHA TANAH MAS**

**Jl. Telaga Mas Raya B - 12**

**Kota Semarang**

**Provinsi Jawa Tengah**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah , yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- **Responsibility** atau **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- **Independensi**, yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- **Fairness** atau **kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Manajemen PT BPR Artha Tanah Mas memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola sehingga BPR Artha Tanah Mas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan .

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Artha Tanah Mas tahun 2025 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 12/SEOJK/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Artha Tanah Mas secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank, baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Artha Tanah Mas. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi BPR Artha Tanah Mas dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Rina Sulistyو Utami</p> <p>NIK *) : 3374106002710001</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan, pengelolaan, menetapkan tujuan dan strategi BPR.</li> <li>b. Menerapkan Tata Kelola, fungsi manajemen risiko serta penerapan APU &amp; PPPSPM pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan</li> <li>d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko</li> <li>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dan pelatihan</li> <li>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</li> <li>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>
2	<p>Nama : Rizky Agus Nugroho</p> <p>NIK *) : 3322150908860002</p> <p>Jabatan : Direktur Bisnis</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:</li> <li>b. Menghimpun dana;</li> <li>c. Menyalurkan kredit;</li> <li>d. Menempatkan dana pada bank lain;</li> <li>e. Menerima penempatan dana dari bank lain;</li> <li>f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris.</li> <li>g. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan BPR.</li> <li>h. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bertanggung jawab atas penyusunan dan tercapainya RBB bersama Direktur yang lain</li> <li>j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko</li> <li>k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>l. Bersama-sama dengan Direktur yang lain menerapkan GCG yang baik, fungsi manajemen risiko serta penerapan APU &amp; PPPSPM</li> </ul>
3	<p>Nama : Donas Yhudisanjaya</p>
	<p>NIK *) : 3313122609790001</p>
	<p>Jabatan : Direktur Operasional dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati - hatian.</li> <li>b. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang - undangan lain.</li> <li>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang - undangan.</li> <li>d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</li> <li>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang - undangan lain yang relevan.</li> <li>f. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan operasional dan IT secara profesional dan memperhatikan prinsip kehati - hatian.</li> <li>g. Bertanggung jawab atas pembuatan peraturan, tata tertib, dan tindakan kedisiplinan.</li> <li>h. Penerapan fungsi kepatuhan pada semua unit kerja dalam organisasi</li> <li>i. Bersama-sama dengan Direktur yang lain menerapkan GCG yang baik, fungsi manajemen risiko serta penerapan APU &amp; PPPSPM.</li> <li>j. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan edukasi, literasi dan inklusi</li> <li>k. Bersama- sama dengan Direktur Utama Bertanggung Jawab atas Sumber Daya Manusia dan Pelatihan</li> <li>l. Bertanggung jawab atas penyusunan dan tercapainya RBB bersama Direktur yang lain</li> </ul>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dengan memperkuat strategi pengelolaan SDM, khususnya dalam pemenuhan posisi strategis, dengan menggunakan trainer eksternal untuk melatih SDM internal yang sekiranya mampu untuk menduduki posisi strategis. Selain itu, proses rekrutment juga diperbaiki , mulai dari</li> </ul>	

<p>penetapan kualifikasi serta pencarian calon SDM, serta proses rekrutment yang melibatkan psikolog HR eksternal. Selain proses rekrutment, untuk pengembangan SDM internal, Direksi telah menyusun KPI secara terbuka dengan proses digitalisasi, yang diharapkan akan berdampak baik pada peningkatan kompetensi secara organik.</p> <p>2) Memastikan setiap pengambilan keputusan strategis, bisnis, dan operasional tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.</p>
---

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Gabriella Gati Wardani
	NIK *) : 3322185309800006
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
2	Nama : Ignatius Adi Kurniawan
	NIK *) : 3374122607830001
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern</p>

	<p>BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol> <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam hal pengelolaan SDM, tahun 2025 Dewan Komisaris melihat tantangan Direksi dalam memenuhi beberapa posisi strategis, secara internal BPR Artha Tanah Mas belum memiliki talent yang memiliki kompetensi yang cukup. Namun Direksi telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan berbagai langkah yang dilakukan sejak recruitment sampai dengan proses pelatihan dan penilaian kinerja SDM.</li> <li>2) Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan POJK POJK No 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola BPR, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi terutama Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan internal audit memastikan tindak lanjut hasil audit baik audit yang dilakukan oleh internal, OJK maupun KAP. Dalam hal pengambilan Keputusan baik strategis, bisnis dan operasional selalu mempertimbangan peraturan dan ketentuan yang ada, opini kepatuhan menjadi pertimbangan yang tak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan. Pada kinerja tahun buku 2025 tidak terdapat penyimpangan peraturan perundangan. Direktur yang membawai fungsi kepatuhan baik secara persuasif maupun perventif memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan baik internal maupun eksternal dan juga perundangan. Pada tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK meskipun secara laba mengalami penurunan.</li> <li>3) Berdasarkan evaluasi dan pencaian kinerja Direksi BPR Artha Tanah Mas pada tahun 2025 dewan komisaris memberikan irekomendasi dalam pemenuhan struktur organisasi untuk posisi strategis dengan memetakan potensi karyawan dengan memanfaatkan hasil digitalisasi KPI, melihat gap kompetensi setiap karyawan sebagai acuan penyusunan program pengembangan karyawan.</li> </ol>

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rina Sulistyo Utami	3374106002710001	0	0
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	0	0
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	0	0	0
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	0	0	0
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001	0	0	0

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	0	0
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006		-	-
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	601385	PT. BPR Mekar Nugraha	7.00

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	Tidak Ada	Tidak Ada	- Vaulinus Bramantya – Suami - Agustina Arshanti – Saudara kandung dari suami - Paulus Agung Krismantara – saudara kandung dari suami
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	Tidak Ada	Tidak Ada	M Florensia Ayu Maharani- Saudara Kandung

**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	3	917.323.673	2	331.208.460
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem / Jasa Produksi	3	182.012.736	2	121.341.824
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya (**)	-	-	-	-
Total			1.099.336.409		425.550.285

- Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil Operasional (3 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan Internal untuk direksi dan keluarga (sebesar Rp 76.620.622/tahun)	Asuransi Kesehatan Internal untuk Dewan Komisaris dan keluarga (sebesar Rp. 27.667.860 per tahun)
4	Fasilitas Lainnya *)	BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja	-

**G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,33	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,50	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,23	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	10,87	:	1

**H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2025	2	Persiapan RUPS tahunan tahun Buku 2024
2	13-06-2025	2	Pencapaian Kinerja BPR Semester 1 tahun 2025
3	08-09-2025	2	Pemantauan Tindak lanjut hasil Audit Internal, OJK dan penunjukan KAP
4	24-11-2025	2	RBB tahun 2026 & Pemantauan rencana penyelesaian kredit bermasalah

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	4	-	100
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	4	-	100

**I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil			Nihil

**J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	Nihil
Dalam proses penyelesaian	1	Nihil
Total	2	Nihil

**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK	Jumlah Dana (Rp)
1	06/01/2025	Sosial	Biaya Karangang Bunga	Keluarga The Hwie Ing	-	400.000
2	04/02/2025	Sosial	Biaya Karangang Bunga	Keluarga Bapak Utomo	-	400.000
3	14/02/2025	Sosial	Biaya Karangang Bunga	KSP Wigata Abdi Abyudaya	-	400.000
4	17/02/2025	Sosial	Biaya Karangang Bunga	Klinik YBE Bright - Bp Bambang Raya	-	250.000
5	03/03/2025	Sosial	Sumbangan bantuan social pertemuan warga Ngaliyan – Renovasi Pembangunan Ngaliyan	RT. 001 RW 010 Ngaliyan	-	157.500
6	07/04/2025	Sosial	Sumbangan duka cita kepada keluarga debitur	Keluarga Septi Krismawati	-	203.000
7	10/04/2025	Sosial	Biaya pemberian parcel untuk anak nasabah	Bp. Agung& Ibu Soimah	-	200.000
8	14/04/2025	Sosial	Biaya sumbangan halal bihalal RT 04 RW 05 Kelurahan Sampangan	Panitia Halal Bihalal RT 04 RW 15 Sampangan	-	150.000
9	26/04/2025	Sosial	Pembelian buah tangan dalam rangka kunjungan istri Debitur sakit	Kaluraga Edi Wardoyo	-	88.400
10	05/05/2025	Sosial	Biaya Karangang Bunga	Keluarga Harianto	-	400.000
11	05/05/2025	Sosial	Biaya Karangang Bunga	Keluarga Ibu RA Soeharnani	-	350.000
12	08/05/2025	Sosial	Sumbangan Acara Apitan Kelurahan Sampangan	Panitia Acara Apitan Kelurahan Sampangan	-	500.000

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK	Jumlah Dana (Rp)
13	16/05/2025	Sosial	Pembelian buah tangan dalam rangka kunjungan nasabah sakit	Keluarga Siauw Oen Nio	-	100.000
14	26/05/2025	Sosial	Biaya Karangian Bunga	Keluarga Ayu Anissa	-	400.000
15	01/07/2025	Sosial	Sumbangan kegiatan jalan sehat lingkungan Kelurahan Panggung Lor	Panitia kegiatan jalan sehat	-	250.000
16	12/07/2025	Sosial	Biaya Papan Bunga	KSP Sarana Bhakti	-	400.000
17	01/08/2025	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RI RW IX Kelurahan Panggung Lor	Panitia HUT RI RW IX Tanggul Mas	-	500.000
18	01/08/2025	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RI RT 06 RW 10 Ngaliyan	Panitia HUT RI RT 06 RW 10 Ngaliyan	-	250.000
19	07/08/2025	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RI RT 04 RW 05 Sampangan	Panitia HUT RI RT 04 RW 05 Sampangan	-	250.000
20	14/08/2025	Sosial	Biaya Karangian Bunga	Keluarga Bp Ferdinand	-	400.00
21	17/09/2025	Sosial	Sumbangan Yayasan Sosial Soegijapranata	Yayasan Sosial Soegijapranata	-	680.000
22	24/10/2025	Sosial	Sumbangan utk Rekoleksi Kerafman Ilahi di Gua Maria Kerep Ambarawa	Pengelola GMKA – Bp Broto	-	1.000.000
23	28/10/2025	Sosial	sumbangan pemilihan RW 01 Kelurahan Panggung Lor	Pengurus RW 01	-	200.000
24	29/10/2025	Sosial	Sumbangan duka cita kepada keluarga Bp Broto – Ignatius Adi Kurniawan	Keluarga Bp Broto – Ignatius Adi Kurniawan	-	1.000.000
25	12/12/2025	Sosial	Sumbangan untuk bantuan bencana	Perbarindo	-	1.800.000

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK	Jumlah Dana (Rp)
			sumatera			
26	23/12/2025	Sosial	Pembelian buah tangan dalam rangka kunjungan debitur sakit	PT Buana	-	100.000

**M. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA**

Hasil Self Assessment penerapan Tata Kelola tahun 2025 secara umum **Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 2 dengan predikat "Baik"**, yang mencerminkan bahwa penerapan tata kelola telah berjalan dengan baik. Struktur, proses, dan hasil tata kelola pada umumnya telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang bersifat minor, kelemahan tersebut tidak bersifat signifikan dan dapat diperbaiki melalui peningkatan pengawasan, penyempurnaan kebijakan, serta konsistensi dalam implementasi tata kelola. Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik dan berkesinambungan diseluruh bagian atau unit kerja BPR Artha Tanah Mas, maka akan diperoleh :

1. Implementasi SOP Tata Kelola secara konsisten di seluruh unit kerja akan memperkuat penerapan tata kelola yang efektif dan sesuai ketentuan.
2. Tersedianya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan akuntabel.
3. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Eksternal berjalan selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga meningkatkan kualitas pengendalian dan transparansi.

BPR telah menerapkan pelaksanaan tata kelola secara umum dengan Baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan masing-masing aspek atas prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal terdapat kelemahan terhadap pelaksanaan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak memberikan dampak signifikan dan bank masih dapat mengelola kelemahan tersebut

Semarang, 28 April 2026  
**PT. BPR ARTHA TANAH MAS**



*Rina Sulisty Utami*  
**Rina Sulisty Utami**  
 Direktur Utama

*Gabriella Gati Wardani*  
**Gabriella Gati Wardani**  
 Komisaris Utama